

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali. 2011. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Ahcmad Ruslan. 2013. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Rangkang Education. Yogyakarta.
- Asdar Nor. 2020. *Sebuah Seni dalam Berdebat*. CV Jejak. Sukabumi Jawa Barat.
- Audrey O'Brien dan Marc Bosc. 2009. *House of Commons Procedure and Practice*. 2<sup>nd</sup> Edition, Cow-anville, QC: House of Commons and Editions Yvon Blais.
- Bagir Manan. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Black, H.C. 1968. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn, West Publishing Co.
- Glen S. Klutz. 2001. *Hitching a ride: Omnibus Legislating in the U.S. Congress*. Ohio State University Press.
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran. Dr. Harjono.,S.H., MCL Wakil Ketua MK*. Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Laurensius Arliman Simbolon. 2019. *Ilmu Perundang-Undangan yang Baik untuk Negara Indonesia*. Deepublish CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Lawrence M. Friedman. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction*. 2nd Edition. Alih Bahasa: Wisnu Basuki. Tatanusa. Jakarta.
- Lorens Bagus. 2005. *Kamus Filsafat*, Cetakan Kelima. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Jenis Fungsi dan Materi Muatan*. Kanisius. Yogyakarta.
- , 2020. *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan Edisi Revisi*. PT. Kanisius. Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Moh. Mahfud M.D. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Pustaka LP3ES. Jakarta.
- , 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*. CV Social Politic Genius. Makassar.
- Nurus Zaman. 2020. *Politik Hukum dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan Hukum*. CV. Literasi Nusantara Abadi. Malang.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1979. *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Alumni. Bandung.
- Philipus M. Hadjon, dkk. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

- Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Mandar Maju.
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Grafika. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- , 2002. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- , 1991. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- , 1986. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- , 2004. *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Sunaryati Hartono. 2014. *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial (Belanda dan Jepang)*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Van der Vlies. 1987. *Handboek Wetgeving*. Zwolle: Tjeenk Willink.

### **Disertasi, Jurnal dan Artikel**

- Abdul Ghani Abdullah. "Pengantar Memahami Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 2 September 2004.
- A. Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara: Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-IV*. Disertasi. Program Pascasarjana. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Adam M. Dodek. "Omnibus Bill: Constitutional Constrains and Legislative Liberations." *Ottawa Law Review*, Vol. 48, No. 1.
- Adhi Setyo Prabowo, Andhika Nugraha Triputra, Yoyok Junaidi. "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia." *Jurnal Pamator*, Vol. 3, Nomor 1 April 2020.
- Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law." *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 6, Edisi III, Oktober - November 2019.
- Asdar Nor, Agung Syaputra, Nurul Zashkia. "Penerapan Omnibus Law untuk Mewujudkan Rumah Ideal di Indonesia." *Kompetisi Debat Konstitusi Mahasiswa Nasional MK RI*, Universitas Hasanuddin, Februari 2020.
- Dhaniswara K. Harjono. "Konsep Omnibus Law Ditinjau Dari Undang Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan." *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 6, Nomor 2 Agustus 2020.
- Firman Freaddy Busroh. "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertahanan." *Jurnal Arena Hukum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang Indonesia, Vol. 10, Nomor 2 Agustus 2017.
- Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta Edisi : 59*, Universitas Dharmawangsa, Januari 2019.

- Maria S.W. Sumardjono, "Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti." *Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan*, Jakarta, 6 Agustus 1997.
- Mirza Satria Buana. 2010. "Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi." Yogyakarta: *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Muh. Guntur. 2001. "Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat menuju Indonesia baru." *Jurnal Antropologi Indonesia Kedua*. Padang.
- Novianto Murti Hartono. "Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya." *Jurnal Parliamentary Review*, Vol II, Nomor 1 Tahun 2020.
- Patrick Keyzer. "The Indonesian Omnibus Law: Opportunities and Challenges." Kuliah Umum, Universitas Brawijaya Malang, 29 Januari 2020.
- Richard Susskind. "Legal informatics: a personal appraisal of context and progresss." *European Journal of Law and Technology*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2010.
- Rocky Marbun. "Grand Design Polik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, Nomor 3 Tahun 2014.
- Romi Librayanto. "Sistem Norma Hukum dalam Mewujudkan Rumusan Norma Hukum yang Ideal (Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan di Indonesia)." *Disertasi*. Program Doktor Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- Sanjaya, A. W. "Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia." *Tesis*. Jember: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember. 2015.
- Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* Vol. 8, Desember 2015.
- Sulasi Rongiyati. "Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law." *Puslit DPR*, Vol. XI No.23, Desember 2019.
- Theresia Ngutra. "Hukum dan Sumber-Sumber Hukum." *Jurnal Supremasi*, Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, Vol. 11, Nomor 2 Oktober 2016.
- Vincent Suriadinata. "Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia." *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 4, Nomor 1 Oktober 2019.

Walhi, "RUU Cipta Kerja: Cilaka Cipta Investasi, Perkeruh Kondisi Krisis Multidimensi." *Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*, Kertas Posisi 6 April 2020.

### **Internet dan Surat Kabar**

A. Ahsin Thohari, Menakar Omnibus Law, Koran Sindo, 30 Oktober 2019.  
<http://www.duhaime.org/LegalDictionary/O/OmnibusBill.aspx>

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, dan <https://putusan.mahkamahagung.go.id/ditjen/tun>.

<http://www.peraturan.go.id>

<https://nasional.kontan.co.id/news/menko-luhut-mengaku-sebagai-pencetus-omnibus-law-cipta-kerja-ini-latar-belakangnya>

<https://nasional.tempo.co/read/1299382/uu-terdampak-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-bertambah-jadi-81/full&view=ok>

<https://projustisianews.id/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law/>

<https://tirto.id/daftar-pasal-bermasalah-dan-kontroversi-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-f5AU>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law?page=2>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f8ab7a0aef18/proses-legislasi-ugal-ugalan--uu-cipta-kerja-dipersoalkan-ke-mk>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5faa40f053a07/pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan/>

<https://www.kemenkumham.go.id/berita/ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-untuk-tingkatkan-pertumbuhan-ekonomi>

<https://www.merdeka.com/jatim/mengenai-apa-itu-omnibus-law-beserta-konsep-dan-sejarah-perkembangannya-klm.html?page=4>

Maria Farida Indrati, "Omnibu Law: UU Sapu Jagat?", *Harian Kompas*, 4 Januari 2020.

Muladi, "RKUHP sebagai Omnibus Law", *Harian Kompas*, 27 November 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Putusan MK RI Nomor 109/PUU-XVIII/2020

Putusan MK RI Nomor 6/PUU-XIX/2021